



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## SUNTIKAN DANA PMN RP 57,9 TRILIUN KE BUMN

**Ari Mulianta Ginting**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[ari.ginting@dpr.go.id](mailto:ari.ginting@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2024 mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. Diantaranya adalah PMN kepada PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) senilai Rp8 triliun meskipun BUMN tersebut sedang mengalami permasalahan hukum dan terdapat indikasi manipulasi laporan keuangan. WIKA menjadi salah satu BUMN yang dimasukkan ke dalam *list* permohonan PMN senilai Rp57,96 triliun pada tahun 2024. Pada sisi lain, WIKA sedang berada di tengah kondisi gagal bayar atau *default* terhadap obligasi yang diterbitkan perseroan dan beberapa utang perseroan. Pada saat yang bersamaan Direktur Utama WIKA, Destiawan Soewardjono sedang ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan korupsi penyelewengan dana *security crowd funding* (SCF) dan proyek fiktif.

Rapat Kerja Kementerian BUMN yang diwaliki oleh Erick Thohir bersama Komisi VI DPR RI mengusulkan adanya PMN tunai kepada delapan BUMN dengan total dana PMN sebesar Rp57,96 triliun. Rincian dana PMN tersebut diantaranya akan digunakan oleh PT PLN (Persero) untuk mencapai target elektrifikasi Rp10 triliun, PT Hutama Karya untuk kebutuhan pendanaan masa operasi, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia sebesar Rp4 triliun untuk membeli tiga kapal penumpang rute perintis. Berikutnya dana PMN sebesar Rp3 triliun untuk PT Indonesia Financial Group (IFG) guna peningkatan kapasitas penjaminan kredit usaha rakyat (KUR). Pemberian dana PMN sebesar Rp3 triliun kepada PT Industri Kerata Api (INKA) untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. PMN juga akan diberikan kepada PT Rekayasa Industri sebesar Rp2 triliun untuk dukungan restrukturisasi permodalan. Pemberian dana PMN akan diberikan juga kepada PT RNI sebesar Rp 1,9 triliun untuk anak perusahaan investasi dan modal kerja. Dana PMN juga akan diberikan kepada IFG untuk menyelesaikan pengalihan polis Asuransi Jiwasraya dan suntikan modal tunai sebesar Rp3,56 triliun. PT WIKA akan diberi PMN sebesar Rp8 triliun untuk penyehatan struktur permodalan. Pemerintah juga akan memberikan tambahan PMN nontunai kepada BUMN sebesar Rp 673,36 miliar. Pemberian PMN nontunai kepada BUMN diantaranya akan dialokasikan kepada PT LEN Industri sebesar Rp649,23 miliar dan Varuna Tirta Prakasya Rp24.13 miliar yang akan digunakan sebagai dana menguatkan struktur permodalan perseroan.

Kepala Center Food, Energy, dan Sustainability Development INDEF, Abra P.G. Talattov memberikan pendapat terhadap rencana pemberian PMN kepada BUMN tahun 2024 sebesar Rp57,96 triliun. Rencana tersebut menurut Abra merupakan kebijakan yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan dampak PMN terhadap kinerja keuangan BUMN yang sangat minim. Pemberian dana PMN yang ditujukan untuk mengurangi beban dan meningkatkan kinerja, tetapi data menunjukkan rasio utang terhadap permodalan atau *debt to equity ratio* (DER) sejumlah BUMN justru meningkat. Abra memberikan contoh PT WIKA yang telah mendapatkan PMN pada tahun sebelumnya justru mencatatkan DER sebesar 590 persen pada tahun 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan terhadap PMN yang telah diberikan kepada BUMN pada periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Hasil catatan BPK dituangkan dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 4 Oktober 2022. Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa pemberian dana PMN dinilai belum memberikan dampak hasil dan dampak optimal. Kementerian BUMN belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas pengelolaan beberapa program yang dibiayai PMN tunai hingga tujuan pemberian PMN belum tercapai sesuai dengan *roadmap* BUMN tahun 2015-2019.

Pemberian dana PMN yang tidak banyak mendukung kinerja kesehatan BUMN membutuhkan strategi yang lebih fundamental. Dalam hal ini perlu penataan terhadap pangkal atau sumber masalah utama BUMN, yaitu pada kendala tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) serta memberantas praktik yang dapat mengarah kepada korupsi. Strategi ini harus disertai dengan restrukturisasi bisnis dan program BUMN demi peningkatan kapasitas dan kompetensi BUMN.

## Atensi DPR

Pengajuan permohonan Kementerian BUMN kepada Komisi VI DPR RI untuk memberikan dana PMN sebesar Rp57,96 triliun pada tahun 2024 perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Pemberian dana PMN kepada beberapa BUMN, termasuk BUMN yang sedang bermasalah tersebut mengundang beberapa catatan, antara lain BPK telah mengeluarkan laporan terkait belum optimalnya dampak dan hasil pemberian PMN kepada BUMN periode 2015 sampai dengan 2018. INDEF juga menyoroti bahwa pemberian dana PMN ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja BUMN dengan salah satu indikator DER, kondisi, dan fakta justru menunjukkan sebaliknya. DPR RI khususnya Komisi VI perlu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap rencana pemberian dana PMN kepada BUMN pada tahun 2024. Evaluasi tersebut harus dapat memastikan bahwa pemberian dana PMN benar-benar tepat, akurat, cermat dan berdampak positif terhadap kinerja BUMN.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 6 Juni 2023;

*Kontan*, 6 Juni 2023;

*Koran Tempo*, 13 & 14 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkofficial

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023